

FENOMENA KEBERADAAN PROSTITUSI DALAM PANDANGAN FEMINISME

Suhar Nanik^{1,2}, Sanggar Kamto², Yayuk Yuliati³

¹Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya

²Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya

³Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

Abstrak

Prostitusi merupakan sebuah fenomena yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan prostitusi terjadi karena adanya dukungan dalam setiap elemen fungsi yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Elemen fungsi dalam terbentuknya prostitusi yang diteliti dalam penelitian ini adalah Mucikari, Wanita Pekerja Seks dan Tokoh Formal. Selain itu keberadaan prostitusi pada wanita pada dasarnya adalah adanya ketidakberdayaan dari kaum wanita dalam aspek kehidupan apabila dibandingkan dengan kaum laki-laki, oleh karena hal tersebut maka kajian dalam perspektif feminisme menjadi keharusan bagi peneliti dalam mengupas persoalan prostitusi yang terjadi pada wanita. Pendekatan fenomenologi dilakukan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian bersifat kualitatif. Data diambil dari para informan Mucikari, Wanita pekerja seks dan tokoh formal dengan teknik wawancara mendalam serta observasi data lapang. Tempat penelitian ini dilakukan di lokasi Moroseneng Surabaya Jawa Timur.

Kata kunci : Keberadaan, Prostitusi, *Feminisme*

Abstract

Prostitution is a phenomenon that exists in society. Life of prostitution due to the support of each element functions are interlinked with each other. The elements have function, this function can make prostitution in society. The element formation of prostitution in this research is meticulous in Pimps, Female Sex Workers and Formal Leaders. Besides of the prostitution in women essentially is the helplessness of the women in this aspect of their life when compared with men, because of that the study of the feminist perspective becomes imperative for researchers to explore the issue of prostitution that occurs in women. Phenomenological approach in this research with the kind of qualitative research. Data was taken from the informant Pimps, Female sex workers and formal leaders with in-depth interviews and observation. This research was conducted in Surabaya East Java at Moroseneng localization.

Keywords: Prostitution, Feminist, Surabaya

PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan sebuah kegiatan yang didalamnya terdapat wanita yang dipekerjakan oleh mucikari untuk memberikan jasa seks terhadap kaum laki-laki. Bahkan Edlund dan Korn (2002) menyebutkan bahwa prostitusi adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh wanita yang memiliki ketrampilan rendah untuk mendapatkan gaji yang tinggi. Namun prostitusi sebagai tempat menularnya HIV/AIDS dalam (Achilles, 1995), dan terdapat 81,9% penularan HIV/AIDS dilakukan dengan hubungan seks antara laki-laki dengan perempuan dengan cara yang tidak aman (DepKes RI, 2012). Prostitusi dianggap sebagai pekerjaan yang melanggar hukum dimana KUHP pasal 296 melarang adanya prostitusi. Namun kenyataannya terdapat 99.105 orang diestimasi sebagai pekerja seks (Depkes RI,

2009). Bahkan (Soekarwo, 2012) menyatakan bahwa terdapat 7.217 wanita pekerja seks yang tersebar 44 lokasi sebagai tempat prostitusi yang tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur¹.

Dari gambaran secara sosiologis terdapat adanya kantong-kantong kemiskinan yang mengisyaratkan bahwa apapun akan dilakukan warga sekitar lokasi untuk melakukan penerimaan dalam mendukung tumbuhnya perekonomian dalam menunjang kebutuhan hidup agar terpenuhi. Kantong-kantong kemiskinan yang tercermin dari wilayah tersebut adalah sebagai daerah pertanian yang sebagian besar penduduknya buruh tani, buruh tambak, buruh pabrik. Dengan tumbuhnya lokasi sebagai tempat prostitusi masyarakat setempat dapat memperoleh penghasilan tambahan sebagai penjual makanan dan minuman di sekitar wisma, menjadi tukang cuci bagi mucikari dan

Alamat korespondensi:

Suhar Nanik

Email : nanikoye@gmail.com

Alamat : Sengkaling Regency E10, Kabupaten Malang

¹ Sumber: okezone.com (2012). Prostitusi di Jawa Timur.

Diakses pada 13 Januari 2013.

wanita pekerja seks serta menjadi tukang bersih-bersih untuk wisma dan penjaga keamanan serta tukang parkir bagi para tamu yang datang.

Moroseneng menjadi tempat prostitusi di perkirakan mulai pada tahun 1970. Moroseneng berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah "datang kesenangan", arti tersebut mengandung makna bahwa barangsiapa yang datang ke daerah tersebut maka akan mendapatkan kesenangan. Moroseneng merupakan sebuah nama jalan raya yang menghubungkan antara kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik. Nama tersebut melekat pada lokalisasi karena cikal bakal awal berdirinya lokalisasi Moroseneng di mulai pada pinggir jalan tersebut. Berawal dari sebuah warung pinggir jalan yang menyediakan jasa wanita dalam melayani seks kemudian dari warung tersebut menjadi wisma. Karena berada di tepi jalan, maka jalan tersebut diberi sebutan "Moroseneng". Setelah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun akhirnya wisma menjadi semakin banyak dan akhirnya masuk sampai ke dalam gang-gang menuju perkampungan. Tumbuh pesatnya wisma tersebut disambut warga setempat dengan tangan terbuka sebagai tanda kesediaan untuk menerima komunitas para mucikari dan wanita pekerja seks menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat tersebut.

Dalam (Soekarwo, 2012) menyatakan bahwa selama ini pihak pemerintah mengalami kesulitan dalam menghapus tempat lokalisasi dikarenakan sebagian dari RT/RW setempat juga menjadi mucikari dan bahkan ada yang menikah dengan salah satu Wanita Pekerja Seks yang terdapat lokalisasi tersebut. Artinya ada sebuah proses sosial yang mengarah pada satu kepentingan yang saling menguntungkan antara masyarakat setempat dengan adanya lokalisasi ditempat tersebut. Sebagaimana dalam (Setiadi dan Kolip, 2011:77) hal tersebut dinamakan dengan proses sosial asosatif, yang menandakan adanya interaksi sosial yang berjalan secara harmoni sehingga muncul kesatuan dalam mencapai sebuah tujuan dalam bermasyarakat. Bahkan menurut Parsons dalam (Paloma, 2010:180) mengungkapkan bahwa sebuah sistem akan berjalan apabila terdapat fungsi-fungsi yang dijalankan secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma naturalis yang bersumber dari pandangan *positivisme*. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis

dengan jenis penelitian kualitatif. Metode ini di pilih dengan dasar pertimbangan bahwa prostitusi merupakan sebuah fenomena yang nyata ada dalam sebuah kehidupan masyarakat. Mengungkap sebuah fakta yang selama ini disembunyikan oleh berbagai pihak kepentingan penguasa dalam melindungi citra sebuah kota atau kabupaten agar terkesan bersih terhadap keberadaan prostitusi. Fenomena ini akan muncul ke permukaan publik apabila terjadi sebuah masalah di dalamnya, seperti kasus HIV/AIDS yang muncul dari hubungan seks yang tidak aman yang biasa dilakukan dalam kegiatan prostitusi. Penelitian kualitatif biasanya dilakukan pendekatan secara mikro untuk mendapat gambaran secara makro tentang sebuah sistem sosial.

Metode Pengumpulan Data

Demikian juga dalam penelitian yang dilakukan di Moroseneng, Surabaya, Jawa Timur ini melakukan pendekatan penelitian dengan informan kunci pada 4 Mucikari, 4 wanita pekerja seks, 3 tokoh masyarakat dan 1 orang perempuan aktivis gender. Lokalisasi Moroseneng ini menjadi target tempat penelitian karena di dalamnya terdapat 437 wanita pekerja seks dan 103 mucikari (Data Sekunder, 2012).

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yang mengacu pada (Miles dan Haberman, 1992) tentang bagaimana menganalisis sebuah data kualitatif. Adapun kegiatan dalam menganalisa data menjadi sebuah analisa tulisan yang bermakna dengan hasil yang memuaskan melalui tahapan sebagaimana berikut:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

Reduksi data digunakan sebagai proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan lapangan. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang mengarah kepada penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan setelah penelitian dilakukan. Sedangkan penarikan kesimpulan merupakan sebuah verifikasi dari kegiatan awal pada saat pengumpulan data dilakukan kemudian setiap data yang diperoleh didapatkan makna yang tersembunyi dibalik makna benda-benda, pola-pola, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab akibat dan preposisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelacuran menjadi persoalan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam prostitusi mengakibatkan multipel traumatik diantaranya 71% kekerasan fisik, 63% diperkosa, 89% tidak menyukai prostitusi tapi tidak berdaya untuk keluar, 75% tidak memiliki rumah dan 68% PTSD/ *Posttraumatic stress disorder* (Farley et al, 2003). Namun disisi lain kerap kali prostitusi menjadi bagian dari sistem masyarakat tersebut sehingga perannya sangat dibutuhkan dalam menunjang sebuah kehidupan dalam bermasyarakat. Prostitusi bisa terjadi pada siapa saja tidak memandang jenis kelamin. Prostitusi bisa terjadi pada kaum laki-laki (Aggleton, 1999) dan perempuan. Selama ini yang menjadi persoalan dan menjadi sorotan perdebatan adalah prostitusi yang terjadi pada kaum perempuan. Padahal kedua macam prostitusi tersebut sama-sama mempunyai dampak terhadap penyebaran HIV/AIDS. Perbedaan dalam memandang prostitusi yang terjadi pada kaum wanita tidak terlepas adanya cara pandang yang salah dari sistem sosial yang di dominasi oleh kaum laki-laki. Budaya patriarkhi membawa dampak yang buruk terhadap wanita yang bekerja sebagai wanita pekerja seks. Stigma dan diskriminasi yang diterima pekerja seks wanita lebih berat bila dibandingkan pekerja seks laki-laki. Oleh karena itulah kaum feminis memberikan wacana yang baru dalam memandang wanita yang bekerja sebagai pekerja seks. Dalam kamus sosiologi (Collins, 2000) kaum feminis melakukan penolakan terhadap kaum laki-laki yang selama ini lebih dominan memberikan pandangan terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat yang cenderung menguntungkan di pihaknya tanpa memperdulikan kepentingan wanita. Padahal dalam (Synnott, 2003) laki-laki dan wanita merupakan dualisme yang berbeda, namun secara biologis 98 persen kromosom wanita dan laki-laki adalah sama.

Kaum feminis menganggap bahwa kaum laki-laki sering kali menganggap remeh persoalan yang terjadi pada kaum wanita (Agger, 2003). Untuk itulah kaum feminis perlu memberikan cara pandang yang berbeda dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi pada wanita. Persoalan prostitusi juga menjadi domain laki-laki dalam memberikan pandangan dan keputusan-keputusan selama ini hanya berpijak pada teori-teori laki-laki. Untuk itulah dalam penelitian ini akan dibahas tentang cara pandang kaum feminis Liberal, feminis Radikal dan feminis Sosialis

dalam memandang prostitusi yang terjadi pada kaum wanita.

Terdapat 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan; dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai sumber wanita pekerja seks untuk daerah kota. Adapun daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Indramayu, Karawang, dan Kuningan di Jawa Barat; Pati, Jepara, Grobogan dan Wonogiri di Jawa Tengah; serta Blitar, Malang, Banyuwangi dan Lamongan di Jawa Timur. Kecamatan Gabus Wetan di Indramayu terkenal sebagai sumber pekerja seks; dan menurut sejarah daerah ini merupakan salah satu sumber perempuan muda untuk dikirim ke istana Sultan Cirebon sebagai selir (Koentjoro,1996:3). Ada persamaan yang telah terjadi dalam temuan dalam penelitian ini yang menggambarkan tentang kota atau kabupaten yang menjadi sumber dari para wanita pekerja seks, sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Daerah Asal Wanita Pekerja Seks

No	Asal Daerah	Prosentase
1.	Malang	29,13%
2.	Luar Jatim	20,9%
3.	Jember	9,45%
4.	Blitar	7,5%
5.	Lumajang	3,9%

Sumber: Yayasan Genta Surabaya, 2012

Data ini diambil oleh peneliti dari Pokja Lokalisasi Moroseneng yang mendata daerah asal dari wanita yang bekerja sebagai wanita pekerja seks di wisma-wisma yang tersebut. Data tersebut diperoleh dari 254 wanita pekerja seks yang bekerja di Moroseneng dengan menyajikan lima besar kota dan kabupaten yang memiliki persentase terbesar diantara kota dan kabupaten lainnya di Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data yang terdapat dari tabel diatas menunjukkan bahwa di Malang terdapat 29,13% wanita pekerja seks yang pergi ke kota Surabaya untuk menjadi pekerja seks. Sedangkan pada urutan yang kedua wanita tersebut berasal dari luar kota Jawa Timur sebesar 20,87%. Daerah asal yang diluar Jawa Timur diantaranya adalah para wanita pekerja seks yang berasal dari Semarang, Pati, Jateng, Sragen, Bandung, Purwokerto, Manado, Indramayu, Ciamis, Tasik, Maluku Utara, Batam dan Pekalongan. Daerah asal yang ketiga adalah para wanita pekerja seks yang berasal dari daerah Jember sebesar 9,45%. Daerah asal yang ke empat adalah para wanita pekerja seks yang berasal dari Blitar sebesar

7,48%. Daerah asal yang ke lima adalah para wanita pekerja seks yang berasal dari daerah Lumajang 3,93%.

Ada beberapa kesamaan yang belum bergeser hingga saat ini, dimana kabupaten dan kota yang kerap sekali menjadi pengirim wanita sebagai pekerja seks seperti Malang dan Blitar dalam temuan dari penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan (Koentjoro, 1996).

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan menyatakan bahwa Moroseneng berdiri sekitar tahun 70an. Adapun sejarah terbentuknya lokalisasi ini berasal dari sebuah warung yang menjual makanan dan minuman untuk para pekerja laki-laki di wilayah tersebut. Para pekerja laki-laki tersebut membutuhkan jasa seks untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dikarenakan mereka jauh dari keluarga dan pasangannya. Seperti halnya dalam teori ekonomi dimana ada permintaan maka ada penawaran, begitu pula dalam kehidupan prostitusi. Dalam prostitusi juga ada keterkaitan yang erat dengan kebutuhan ekonomi. Kemudian dari kelompok-kelompok kecil yang berupa warung pinggir jalan tersebut menyediakan wanita pekerja seks. Akhirnya dari beberapa warung yang menyediakan wanita pekerja seks sedikit demi sedikit berubah menjadi wisma. Pada mulanya wisma hanya berada di pinggir jalan raya yang besar saja, namun akhirnya semakin banyak dan masuk ke dalam yang berupa gang-gang yang dipenuhi dengan wisma. Semakin banyak wisma yang terdapat di lokalisasi Moroseneng menjadi daerah prostitusi yang mendapat ijin dari beberapa aparat setempat, meskipun secara tata aturan hukum parktek prostitusi dilarang dan melanggar undang-undang.

Feminisme Liberal

Pandangan feminis liberal melihat bahwa wanita sejajar dengan laki-laki, memiliki hak-hak yang sama, dan tidak bertentangan melainkan identik, karena keduanya berasal dari satu kromosom yang sama (Synnot, 2003). Dalam Perspektif feminisme liberal terhadap wanita pekerja seks menyatakan bahwa pekerjaan dilakukan tersebut karena rendahnya pendidikan dan ketrampilan. Berikut pandangan feminis liberal yang dianjurkan oleh (Dominella, 2002). Dalam pandangan feminis ini akhirnya dipergunakan untuk membahas prostitusi yang terjadi pada kaum wanita, adapun pandangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Memfokuskan pada perlakuan yang sama terhadap wanita diluar, dari pada di dalam keluarga. Dalam kehidupan wanita yang bekerja sebagai pekerja seks tidak mendapatkan adanya perlakuan yang sama dalam keluarganya. Seperti yang dialami oleh Yn, sebagai wanita pekerja seks harus bekerja melayani tamu sedangkan suami atau kiwirnya hanya nunggu di tempat kosannya aja tidak bekerja, hanya sebagai pengangguran.
- 2) Memperluas kesempatan dalam pendidikan dianggap sebagai cara paling efektif dalam melakukan perubahan sosial. Terjebaknya wanita pekerja seks dalam pekerjaan sebagai penjual jasa seks merupakan akibat dari minimnya kesempatan yang diperoleh wanita tersebut dalam bidang pendidikan.
- 3) Pekerjaan-pekerjaan “wanita” seperti perawatan anak dan pekerjaan rumah tangga dipandang sebagai pekerjaan tidak terampil yang hanya mengandalkan tubuh, bukan pikiran rasional. Begitu juga pekerjaan dalam melayani jasa seks, juga dianggap sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan ketrampilan khusus yang hanya mengandalkan tubuh saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Edlund dan Korn (2002), dalam penelitian ini menyebutkan bahwa prostitusi adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dengan ketrampilan yang rendah namun mendapatkan gaji yang besar. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sachsida dan Moreira (2010) dimana prostitusi merupakan pekerjaan dengan gaji yang besar namun pekerja tersebut dalam kondisi buruk.
- 4) Perjuangan harus menyentuh kesetaraan politik antara wanita dan laki-laki melalui penguatan perwakilan wanita diruang-ruang publik. Para feminis liberal aktif memonitor pemilihan umum dan mendukung laki-laki yang memperjuangkan kepentingan wanita. Kehidupan para wanita pekerja seks pada wilayah politik tidak memungkinkan karena kebanyakan wanita yang berada di lokalisasi pada kota atau kabupaten tertentu bukan penduduk asli kota atau kabupaten tersebut sehingga tidak mempunyai hak pilih dalam kehidupan berpolitik pada kota maupun kabupaten tersebut. Namun apabila wanita pekerja seks tersebut pulang ke daerah asalnya maka secara alami status sebagai wanita pekerja seks akan hilang, kemudian

wanita tersebut mempunyai hak pilih dalam kehidupan berpolitik.

Feminisme Radikal

Perspektif feminisme radikal melihat bahwa status sosial wanita tidak seimbang dengan kaum laki-laki, apalagi kalau wanita tersebut menjadi pekerja seks maka lebih buruk status sosialnya. Sedangkan feminisme radikal menurut (Dominella, 2002) yang dipergunakan dalam pembahasan prostitusi pada kaum wanita adalah sebagai berikut:

- 1) *'The personal is political'* adalah slogan yang kerap digunakan oleh feminis radikal. Maknanya bahwa pengalaman-pengalaman individual wanita mengenai ketidakadilan dan kesengsaraan yang dialami oleh para wanita dianggap sebagai masalah-masalah personal, pada hakikatnya adalah isu-isu politik yang berakar pada ketidakseimbangan kekuasaan antara wanita dan laki-laki. Prostitusi menjebak wanita dalam lingkungan yang tidak memihak pada wanita, kesehatan, keamanan, pelecehan dan tekanan lahir serta bathin menjadi kehidupan yang dialami wanita tersebut. Perempuan yang duduk dalam posisi legelatif saat ini tidak mampu membuat sebuah kebijakan yang memahami persoalan wanita pekerja seks, terbukti KUHP pasal 296 tidak mampu melindungi wanita agar tidak masuk dalam kehidupan prostitusi.
- 2) Memprotes eksploitasi wanita dan pelaksanaan peran sebagai istri, Ibu dan pasangan seks laki-laki, serta menganggap perkawinan sebagai bentuk formalisasi pendiskriminasian terhadap wanita. Kalau dalam wilayah institusi keluarga saja wanita seharusnya mendapatkan perlindungan terhadap pendiskriminasian terhadap wanita, lalu bagaimana dengan wanita yang melayani laki-laki dalam kehidupan prostitusi? Adakah sebuah jawaban terhadap wanita agar kedudukannya sama terhadap laki-laki. Perempuan menjadi bagian yang dilecehkan dan didiskriminalisasikan kedudukannya terhadap laki-laki. Kedudukan ini terjadi karena laki-laki yang membayar wanita dalam pelayanan jasa seksnya sehingga mereka mampu lakukan apapun termasuk pelecehan seksual.
- 3) Menggambarkan sexism sebagai sistem sosial yang terdiri dari hukum, tradisi, ekonomi, pendidikan, lembaga keagamaan, ilmu pengetahuan, bahasa, media massa, moralitas seksual, perawatan anak,

pembagian kerja dan interaksi sosial sehari-hari. Agenda tersembunyi dari sistem sosial itu adalah memberi kekuasaan melebihi wanita. Sistem sosial yang dibangun dalam masyarakat lokalisasi tidak mampu menyamakan kedudukan antara wanita dan laki-laki. Hal tersebut terjadi karena wanita pada posisi membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan materi, namun ketrampilan dan pendidikan yang dimiliki wanita tersebut rendah. Menjadi pelayan seks merupakan pembagian pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh wanita dalam sebuah institusi keluarga.

- 4) Masyarakat harus diubah secara menyeluruh, lembaga-lembaga sosial yang paling fundamental harus diubah secara fundamental pula. Para feminis radikal menolak perkawinan bukan hanya dalam teori, melainkan sering pula dalam praktek. Jika feminis ini menolak sebuah institusi keluarga dalam melindungi hak-hak kaum wanita maka bagaimana jika perempuan dalam prostitusi. Pasti akan semakin ditolak karena ketidakseimbangan antara laki-laki dan wanita terjadi disana.
- 5) Menolak sistem hierarkis yang berstrata berdasarkan garis jender dan kelas, sebagaimana diterima oleh feminisme liberal. Oleh karena penolakan ini maka seharusnya wanita yang bekerja dalam sebuah lokalisasi sebagai wanita pekerja seks harus di hapuskan. Sebab kedudukan sistem hierarkis yang terjadi pada wanita pekerja seks dalam masyarakat lokalisasi berada pada posisi yang sangat rendah sekali. Sistem sosial yang dibangun tidak mampu membuat wanita pekerja seks naik pada posisi hierarkis sosial yang tinggi.

Feminisme Sosialis

Perspektif feminisme sosialis memandang bahwa pekerjaan disektor seks harus di beri gaji yang layak dan mendapatkan jaminan kesehatan dan keamanan. Prostitusi melanggar undang-undang, namun dalam beberapa kebijakan malah cenderung melegalkan prostitusi tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Dominella, 2002) dalam memahami feminisme sosialis adalah meliputi hal sebagai berikut:

- 1) Wanita tidak dimasukkan dalam analisis kelas, karena pandangan bahwa wanita tidak memiliki hubungan dengan alat-alat produksi. Karenanya, perubahan alat-alat produksi merupakan *"Necessary Condition"* meskipun belum *"Sufficient Condition"*,

- dalam mengubah faktor-faktor yang mempengaruhi penindasan terhadap wanita.
- 2) Menganjurkan solusi untuk membayar wanita atas pekerjaannya yang dia lakukan dirumah. Status sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaannya sangat penting bagi berfungsinya sistem kapitalisme.
 - 3) Kapitalisme memperkuat seksisme, karena memisahkan antara pekerjaan bergaji dengan pekerjaan rumah tangga dan mendesak agar wanita melakukan pekerjaan domestik.

Dalam pandangan feminisme sosialis terhadap prostitusi cenderung lebih memahami dan tidak melarang adanya transaksi seks ditukar dengan uang. Wanita berhak mendapatkan hak berupa gaji dalam rangka pelayanan terhadap laki-laki dalam jasa seks. Wanita harus dihargai sebagai pendukung kaum laki-laki dalam menjalankan fungsi dan peranya dalam status, meskipun yang dilakukan oleh pihak wanita hanya melakukan pekerjaan yang bersifat domestik termasuk memberikan jasa seks. Wanita tidak seharusnya menjadi bahasan dalam mendapatkan status sosial dalam masyarakat karena peran domestik yang dilakukan wanita tidak memungkinkan untuk mendapatkan hal tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah prostitusi menjadi bagian dari subsistem dalam sebuah sistem sosial yang diperlukan dalam masyarakat. Dari pandangan feminisme wanita selalu berada tidak sejajar dengan kaum laki-laki dan mendapatkan diskriminasi dari sistem sosial. Wanita yang bekerja sebagai pekerja seks merupakan bentuk dari adanya ketidak sejajaran yang diterima kaum wanita terhadap laki-laki. Ketidak sejajaran ini terjadi akibat dari kurangnya peran wanita dalam mengakses pendidikan dan peran politik dalam publik. Kriminalisasi yang diperlakukan pada prostitusi tidak mempan melawan kebijakan dengan kepentingan berbagai program dan kesepakatan lokal. Saran dari hasil penelitian ini adalah sistem sosial dan hukum seharusnya lebih adil dalam melihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan prostitusi. Bukan malah memberikan strata sosial yang rendah dan memberikan perlakuan hukum yang tidak sepatasnya, karena dalam prostitusi yang bersalah adalah mucikari bukan wanita pekerja seksnya. Kebijakan yang berpihak pada wanita dengan memberikan lebih banyak kesempatan

pada bidang pendidikan, peran publik dan peran politik. Dengan hukum dan kebijakan yang berpihak kepada kaum wanita akan mampu memberikan perlindungan pada wanita agar tidak terjebak dalam pekerjaan seks yang memberikan dampak buruk bagi wanita. Prostitusi yang dilegalkan dalam (Farley et al, 2003) memberikan dampak yang positif untuk menekan kemungkinan adanya trafficking dalam prostitusi. Perdagangan manusia dalam prostitusi sangat dimungkinkan karena wanita tersebut pada awalnya tidak tahu dan tidak menyangka kalau pada akhirnya dipekerjakan oleh para penyalur tenaga kerja sebagai pekerja seks. Wanita tersebut didatangkan dari berbagai daerah yang kehidupan ekonominya minim untuk mendapatkan pekerjaan dikota besar.

Saran

Banyak sekali kekurangan yang masih harus dipenuhi dalam mengupas tentang kehidupan prostitusi yang berdampak secara sosial, ekonomi, budaya dan politik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan prostitusi tidak hanya terjadi pada kaum wanita, namun juga terjadi pada kaum laki-laki dan anak-anak dibawah umur. Oleh karena itu peneliti sangat berharap ada peneliti selanjutnya untuk mengupas tentang fenomena tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang peneliti sampaikan kepada institusi Universitas Brawijaya yang telah memberikan support kepada peneliti hingga kegiatan yang berbuah manis ini menjadi nyata. Penelitian ini tidak berarti apa-apa tanpa ada keterlibatan dari masyarakat dimana penelitian ini dilakukan, kepada mereka peneliti mengucapkan terimakasih atas kesediaannya menjadi tempat belajar dalam mengupas kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achilles, R. 1995. *The Regulation Of Prostitution: Paper*. Ottawa:Canadian Public Health Association.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi – Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Cetakan Pertama. Kencana Perdana Media Group. Jakarta.
- Eldlund L, Korn E . 2002. *A Teory of Prostitution, Journal of Political Economy*. By University of Chicago.

- <http://www.depkes.go.id/index.php/component/content/article/43-newslider/2186-perkembangan-hiv-aids-di-indonesia-triwulan-iii-tahun-2012.html> diakses pada tanggal 6 Mei 2013.
- Poloma, Margaret M. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Dominella, Lena. 2002. "*Feminis Theory*" dalam Martin Davies (ed), *Companion to Social Worker*, Oxford Blackwell.
- Aggleton, P. 1999. *Men Who Sell Sex*. London, UK: Institute Of Education, University Of London.
- Synnott, Anthony. 2003. *Tubuh Sosial: Simbolisme, Diri, dan Masyarakat*. JALASUTRA. Yogyakarta.
- Collins. 2000. *internet-linked dictionary of Sociology*. HarperCollins Publishers. Glasgow.
- Koentjaraningrat. 1996. *Prostitusi di Indonesia: Sebuah Analisis Kasus di Jawa*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Farley, et al. 2003. *Prostitution and trafficking in nine Countries: An Update on violence and Posttraumatic Stress Disorder*. Dapat diakses http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J18910.1300/J189v02n03_03
- Milles, M.B dan Haberman. 1992. *Qualitative Data Analysis*. 2d ed. Thousand Oaks, CA. Sage Publications.
- Sachasida A, Moreira TBS. 2010. *A Theory of Prostitution*. *Economia e Desenvolvimento*, Recife (PE), V.9.n.1